

**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DI DESA TASINIFU KECAMATAN MUTIS
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S1)



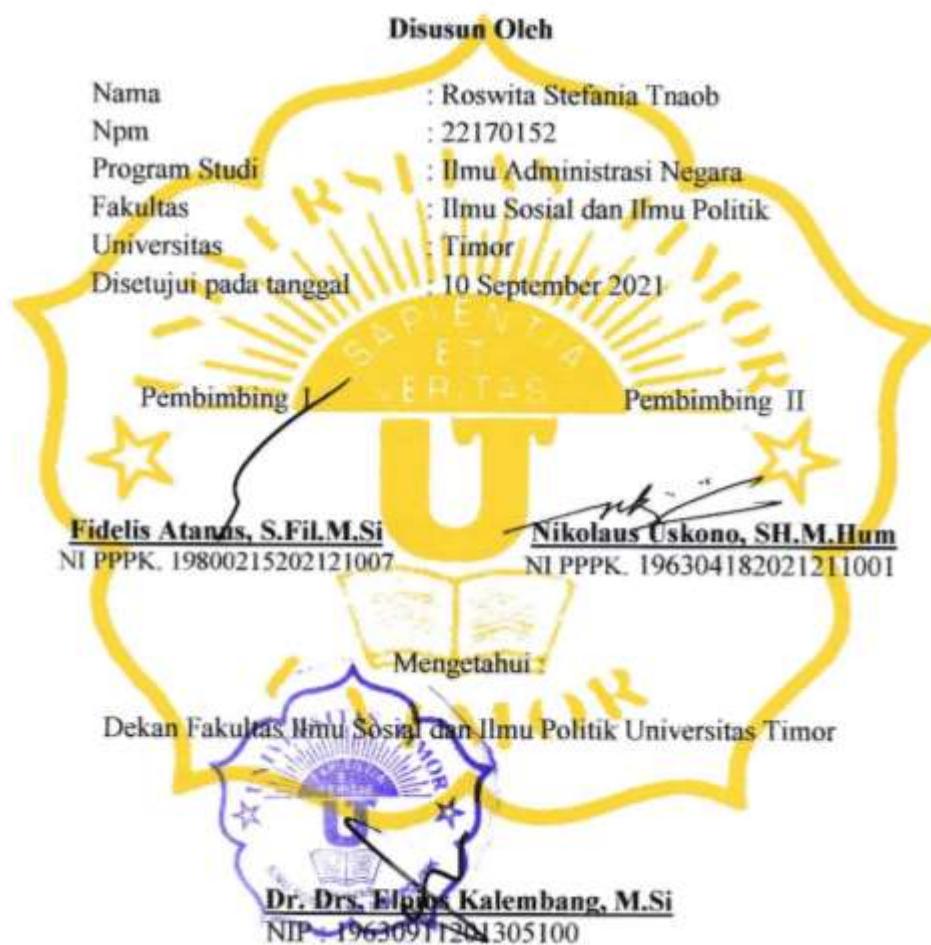
OLEH

ROSWITA STEFANIA TNAOB
NPM 22 17 01 52

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS TIMOR
KEFAMENANU
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DI DESA TASINIFU KECAMATAN
MUTIS KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA



HALAMAN PENGESAHAN

Judul : PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DI DESA TASINIFU KECAMATAN
MUTIS KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Disusun Oleh

Roswita Stefania Tnaob

NPM : 22170152

Skripsi ini telah dipertahankan
Di hadapan dewan pengaji pada :

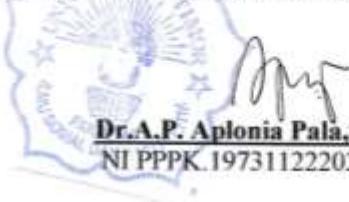
Hari : Kamis
Tanggal : 30 September 2021
Tempat : Ruangan AN 1
Waktu : Pukul. 14.00 wita s/d Selesai

Susunan Dewan Pengaji

1. Dr.A.P. Aplonia Pala,S.Sos.,MM
(Ketua)
2. Nikolaus Uskono, SH. M.Hum
(Sekertaris)
3. Fidelis Atanus, S.Fil. M.Si
(Anggota)

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor



PERNYATAAN ORISINALITAS SKIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini dengan judul **PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA TASINIFU KECAMATAN MUTIS KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah SKRIPSI ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia SKRIPSI ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh Sarjana Sosial (S.Sos) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Kefamenanu, 30 September 2021



Mahasiswa,

NAMA : Roswita Stefania Tnaob
NPM : 22170152
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

MOTTO

**“RAHASIA KESUKSESAN ADALAH MELAKUKAN HAL YANG BIASA
SECARA TAK BIASA”**

(By: Stefania)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Suamiku tercita Heribertus Antonius Efi, SH dan kedua anakku tersayang Petra Efi dan Diego Efi yang selalu memberikan dukungan baik dukungan moril maupun dukungan doa demi keberhasilanku.
2. Orang Tuaku Bapak Jasintus Tnaob dan Mama Maria Naben yang selalu setia mendukung dan mendoakan keberhasilanku.
3. Saudara-saudariku: Kakak Judith/sek, kakak Osa/sek, kakak Okto/sek, kakak Bertus/sek, kakak Beni, kakak Ona/sek, kakak Edy (Alm), adik Dusi, adik Rio serta Ipar-Ipar saya: Kakak Vera/sek, kakak Kristo/sek, adik Atri/sek, adik Jely/sek dan adik Doni/Sek yang selalu memberikan dukungan dan motifasi dengan cara mereka masing-masing.
4. Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penulis panjatkan kehadirat-Nya, karena atas berkat dan bimbingan-Nya sehingga tulisan dengan judul **PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA TASINIFU KECAMATAN MUTIS KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA** dapat diselesaikan dengan baik. Tulisan ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S1) Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Bahwa dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “*Development Community*” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri atau Otonom berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Tuntutan tersebut telah ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Ruang gerak untuk memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan hak-hak tradisional telah diatur dalam tujuan dan fungsi Lembaga Adat Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota. Dalam pembentukannya, perlu adanya kajian terdahulu terkait karakteristik sistem pemerintahan desa asli (*unsur-unsur otonomi desa asli*) yang ada di setiap

desa/kelurahan dengan unsur-unsur pemerintahan yang modern sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikehendaki UUD 1945.

Pada kesempatan ini tak lupa penulis haturkan banyak terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Ir. Stefanus Sio, MP, selaku Rektor Universitas Timor.
2. Dr.Drs. Elpius Kalembang, M.SI, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mengetuji skripsi ini.
3. Dr. AP. Aplonia Pala, S.SOS, M.M, Selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara dan selaku Dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulisan proposal ini. Serta memberikan koreksi-koreksi disertai dengan kritikan yang membangun guna perbaikan penulisan skripsi ini. Bersama Bapak/Ibu Dosen yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan selama ini.
4. Bapak Fidelis Atanus, S.FIL.M.Si Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
5. Bapak Nikolaus Uskono, SH.M.HUM Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
5. Suamiku tercinta Heribertus Antonius Efi, SH yang telah membiayai selama proses kuliah hingga menyelesaikan tulisan ini serta kedua

anakku tersayang Petra Efi dan Diego Efi yang selalu memberikan dukungan moril maupun dukungan doa demi keberhasilanku.

6. Kedua Orang Tua tercinta, yang telah melahirkan, membesarakan, dan mendukung penulis selama proses perkuliahan hingga penyelesaian tulisan ini.
7. Teman-teman seperjuangan dengan caranya masing-masing memberikan masukan yang konstruksi selama penulis menimba ilmu di Universitas Timor.
8. Semua pihak yang tidak saya sebutkan satu per satu dengan caranya masing-masing telah merelakan waktunya serta menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena mengingat kemampuan dan keterbatasan pengetahuan penulis, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi sangat diharapkan penulis.

Akhirnya besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca dan pada umumnya. Terima kasih

Kefamenanu, 30 September 2021

Penulis

ABSTRAK

Roswita Stefania Tnaob, Npm: 22170152: Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Tasinifu Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara. Pengaturan baru tentang pemerintahan daerah (*local government*) melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, merupakan langkah yang penting dan relevan mengingat pemerintah daerah menempati posisi yang strategis dalam penyelenggaraan Negara Indonesia dengan menempatkan pemerintah desa secara proporsional untuk mempergunakan hak-hak dan kewenangannya dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan aspirasi yang berkembang dan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian otonomi desa dimaksud telah diatur khusus dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri atau Otonom berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam mengurus kepentingan masyarakat berkaitan dengan hak asal usul dan hak tradisional masyarakat adat maka tuntutan ini telah ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Ruang gerak untuk memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan hak-hak tradisional telah diatur dalam tugas dan fungsi Lembaga Adat Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa meliputi (1) Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya; (2) Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di desa; (3) Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah desa; (4) Mengembangkan nilai adat istiadat dalam menyelesaikan sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia; (5) Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; (6) Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan (7) Mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Hasil penelitian tentang Peran Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Tasinifu Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara dalam upaya melindungi, melestarikan dan mengembangkan nilai adat istiadat sesuai dengan tugas dan fungsi diatas diperlukan adanya hubungan kemitraan, hubungan koordinasi dan hubungan kontrol social antara lembaga adat desa dan pemerintah desa untuk membentuk semua peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya yang berkaitan dengan kelembagaan adat desa serta bentuk-bentuk kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci: Peran, Lembaga Adat, Pemerintahan Desa

ABSTRACT

Roswita Stefania Tnaob, Npm: 22170152: Role Of Traditional Institutions In Implementing Village Government In Tasinifu Village, Mutis District, Timor Central North Timor Regency. The new regulation on local government through Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government is an important and relevant step considering that regional governments occupy a strategic position in the administration of the Indonesian state by placing village governments proportionally to exercise their rights and authorities in regulate and manage the interests of the community in accordance with developing aspirations and democratic values. Thus, the village autonomy has been specifically regulated by Law Number 6 of 2014 concerning Villages, namely the authority to regulate the village independently or autonomously based on local origins and customs.

In managing the interests of the community related to the rights of origin and traditional rights of indigenous peoples, this claim has been followed up with Permendagri Number 18 of 2018 concerning Village Community Institutions and Village Traditional Institutions. The space for empowering, preserving and developing traditional customs and rights has been regulated in the duties and functions of the Village Customary Institutions established based on Village Regulations including (1) Protecting the cultural identity and traditional rights of indigenous peoples including birth, death, marriage and other elements of other kinship; (2) Preserving ulayat rights, ulayat land, customary forest, and other customary assets/or assets for the people's livelihood, environmental preservation, and overcoming poverty in the village; (3) Developing consensus deliberation for decision making in village deliberations; (4) Developing traditional values in resolving disputes over inheritance, land and conflicts in human interaction; (5) Development of traditional values for peace, tranquility and order in the village community; (6) Developing customary values for health, public education, arts and culture, environment, and other activities; and (7) Develop cooperation with other LADs.

The results of the research on the role of traditional institutions in the implementation of village governance in Tasinifu village, Mutis district, North Central Timor regency in an effort to protect, preserve and develop traditional values in accordance with the duties and functions above, it is necessary to have a partnership relationship, coordination relationship and social control relationship between village traditional institutions and the village government to form all village regulations in the administration of village governance, especially those relating to village customary institutions and other forms of activity that are beneficial to the welfare of the village community.

Keywords: The Role of Traditional, Institutions, Village Government.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Peran.....	11
2.2 Lembaga Adat	14
2.2.1 Esensi Pembentukan Lembaga Adat Desa	14
2.2.2 Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa	18
2.2.3 Jenis dan Kepengurusan Lembaga Adat Desa.....	23
2.3 Pranata Sosial.....	23
2.3.1 Proses timbulnya pranata social	25
2.3.2 Macam dan bentuk pranata social	25
2.4 Pemerintahan Desa.....	27
2.4.1 Desa Sebagai Persekutuan Masyarakat Hukum	27
2.4.2 Otonomi Desa: Dimensi Bentuk.....	32
2.4.3 Otonomi Desa: Dimensi Budaya	38

2.4.4	Otonomi Desa: Dimensi Ekonomi.....	40
2.5	Kerangka Pikir Penelitian	41
BAB III METOD PENELITIAN.....		44
3.1	Jenis Penelitian.....	44
3.2	Fokus Penelitian.....	44
3.3	Sumber Data.....	45
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5	Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		49
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
4.2	Penyajian Data Dan Fokus	56
4.3	Pembahasan.....	66
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		78
5.1	Simpulan	78
5.2	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.3.1Mata Pencaharian Penduduk Desa Tasinifu.....	53
Tabel 4.1.3.2 Jenis Tanaman Bahan Makanan, Luas Lahan, Hasil Produksi ...	54
Tabel 4.1.3.3Jenis Tanaman Hasil Bumi Dan Produksi.....	54
Tabel 4.1.3.4Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak	55
Tabel 4.1.4.1Jumlah Penduduk Desa Tasinifu.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.5.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	43
Gambar 3.5.1 Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara

Lampiran 2. Foto Wawancara

Lampiran 3. Struktur Lembaga Adat Desa Tasinifu

Lampiran 4. Surat ijin penelitian dari Fakultas

Lampiran 5. Surat keterangan selesai penelitian dari tempat penelitian